

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianti, Wella. 2012. *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Pratama) Kota Tanjungpinang*. Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali.
- Arikunto. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Aksara.
- Basri, Faisal. 1995. *Perekonomian Indonesia menjelang abad XXI distorsi peluang dan kendala (tinjauan sekilas mengenai ekonomi politik hubungan pusat dan daerah di Indonesia)*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: PPA-FE Universitas Gajah Mada.
- Brotodiharjo, R, Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Pertama. Buku Pertama. Cetakan Pertama. Bandung: Eresco,.
- Devas, Nick., et. al. 1989. *Financing Local Government in Indonesia*. Ohio University Center for International Studies Monograph in International Studies, Southeast Asias Series Number 84. Ohio: Athen,
- Devas, Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI- Press.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Jogiyanto. (2009). *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.

- Ibnu Mujib, 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah-Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Daerah*, Sekolah Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
- Jachjasaputra, M.H. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pengembangan Perekonomian Rakyat Jawa Barat Dalam Menghadapi Otonomi Daerah*. Makalah Seminar Regional HIMA EKSTENSI UNPAD, Bandung: 8 Agustus 2011, pp.4.
- Jimmy, Jackson. 2010. *Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang-NTT)*. Program Magister Manajemen. Universitas Brawijaya. Malang.
- Jogiyanto. (2010). *Analisis & Disain*. Yogyakarta: Andi.
- Kaho, J.R. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kustiawan, M., dan Solikin, I. 2005. *Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi. Nomor 1. Volume 2.
- Mahi, Raksasa, 2000. *Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari segi Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*, Analisis CSIS Tahun XXIX/2000 No. 1, 54-56.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosmakarya Offset.
- Nugroho, dan Ricky. 2006. *Bumn Indonesia: Isu, Kebijakan, Strategi*. Jakarta: Gramedia.
- Norman. 2003. *Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD (studi pelaksanaan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah di kabupaten Bulungan Kalimantan*

- Timur*), Tesis S-2, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang (Tidak Dipublikasikan).
- Oates, Wallace E. 1995. *Comment on Conflict and Dilemmas of Decentralization by Rudolf Holmes*. The World Bank Research Observer.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmi, Ade. 2013. *Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Padang)*. Program Studi Akuntansi. Universitas Negeri Padang.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan*. Buku 1. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No.2, Pusat Pengembangan dan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Sarwono, Jonathan. 2009. *Statistik Itu Mudah SPSS 16*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan secara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002.

- Soemitro, Rochmat. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pajak, Pajak Pendapatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2009. *Metode Riset Bisnis*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi.
- Suparmo, dan Theresia. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- http://beta.stialanbandung.ac.id/images/stories/jurnal_administrasi/105-03memen.pdf